

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada saat ini topik mengenai tanggung jawab sosial perusahaan atau yang lebih dikenal dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR) semakin banyak mendapatkan perhatian dan dibahas. Salah satu aspek dari CSR yang menjadi perhatian adalah pengungkapannya. Hal ini disebabkan laporan keuangan tradisional tidak mencakup aktivitas CSR perusahaan. Pengungkapan CSR yang lebih rinci dapat memfasilitasi investor dan pemegang saham dalam menilai apakah pengungkapan CSR perusahaan sejalan dengan kepentingan mereka.

Disisi lain masyarakat juga semakin kritis dan mampu melakukan kontrol sosial terhadap dunia usaha. Perubahan pada tingkat kesadaran masyarakat tersebut memunculkan kesadaran baru tentang pentingnya melaksanakan CSR. Hal lain yang mempengaruhi perkembangan CSR pada saat ini adalah semakin parahnya kerusakan lingkungan, mulai dari polusi udara dan air, penggundulan hutan hingga isu perubahan iklim.

Sejalan dengan perkembangan tersebut, pemerintah melalui Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mewajibkan perseroan yang bidang usahanya dibidang atau terkait dengan bidang

sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Peraturan lain yang berhubungan dengan CSR adalah Undang-Undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dimana pada pasal 15 (1) menyatakan bahwa setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Dengan demikian, CSR merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap perusahaan.

CSR menjadikan perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada *single bottom line*, yaitu nilai perusahaan (*corporate value*) yang direfleksikan hanya dalam kondisi keuangannya saja. Tapi tanggung jawab perusahaan harus berpijak pada *triple bottom lines*, yaitu juga memperhatikan masalah sosial dan lingkungan. Karena kondisi keuangan saja tidak cukup menjamin nilai perusahaan bertumbuh secara berkelanjutan. *Global Compact Initiative* (2002) menyebut pemahaman ini dengan 3P (*Profit, People, Planet*) yaitu tujuan bisnis tidak hanya mencari laba (*profit*), tetapi juga menyejahterakan orang (*people*), dan menjamin keberlanjutan hidup planet Bumi (*planet*).

CSR merupakan komitmen perusahaan untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan melalui kerjasama dengan karyawan, komunitas setempat, dan masyarakat agar memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan. Dari aspek

ekonomi, perusahaan mengungkapkan suatu apabila informasi tersebut dapat meningkatkan nilai perusahaan. Dari aspek investasi, investor cenderung menanamkan modal pada perusahaan yang memiliki kepedulian pada masalah sosial. Perusahaan akan menggunakan informasi tanggung jawab sosial sebagai keunggulan kompetitif perusahaan.

Kepemilikan saham pemerintah adalah jumlah saham perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah. Melalui kepemilikan saham ini pemerintah berhak menetapkan direktur perusahaan. Selain itu pemerintah dapat mengendalikan kebijakan yang diambil oleh manajemen agar sesuai dengan kepentingan/aspirasi pemerintah (Amran dan Devi, 2008).

Kepemilikan asing adalah jumlah saham yang dimiliki oleh pihak asing (luar negeri) baik oleh individu maupun lembaga terhadap saham perusahaan di Indonesia. Kepemilikan asing merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh perusahaan multinasional (Djakman dan Machmud, 2008). Kepemilikan asing dalam perusahaan merupakan pihak yang dianggap lebih peduli terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Negara-negara di Eropa dan Amerika merupakan negara-negara yang sangat memperhatikan isu-isu sosial; seperti pelanggaran hak asasi manusia, pendidikan, tenaga kerja, dan isu lingkungan seperti, efek rumah kaca, pembalakan liar, serta pencemaran air.

Penelitian ini dilakukan untuk menguji hubungan struktur kepemilikan pemerintah dan kepemilikan asing dengan pengungkapan CSR. Semakin besar kepemilikan pemerintah dan kepemilikan asing maka semakin luas pula pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Penelitian ini juga dimotivasi oleh masih rendahnya kuantitas praktek pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Selain itu pada beberapa penelitian terdahulu masih terdapat *Research Gap* atau ketidak konsistenan hasil penelitian.

Penelitian ini melanjutkan penelitian Darus et al (2009) yang meneliti tentang pengungkapan tanggung jawaban sosial pada perusahaan di Malaysia. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kepemilikan pemerintah dan kepemilikan asing berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial.

Amran dan Devi (2008) meneliti mengenai pengaruh pemerintah dan afiliasi dengan pihak asing terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan pemerintah berpengaruh terhadap pengungkapan CSR di Malaysia, sedangkan kepemilikan asing tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan CSR di Malaysia.

Djakman dan Machmud (2008) meneliti pengaruh struktur kepemilikan terhadap luas pengungkapan pertanggungjawaban sosial pada perusahaan publik yang terdaftar di BEI tahun 2006. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa, kepemilikan institusional, kepemilikan asing, serta kategori perusahaan BUMN dan non BUMN tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Sedangkan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada penelitian Darus et al (2009) dan Amran dan Devi (2008) membahas pengungkapan tanggung jawab sosial pada perusahaan yang terdapat di Malaysia, sedangkan penelitian ini membahas pengungkapan tanggung jawab sosial di Indonesia. Pada penelitian Djakman dan Machmud (2008) membahas pengungkapan tanggung jawab sosial pada perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2006, sedangkan penelitian ini membahas pengungkapan tanggung jawab sosial pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2009-2010. Di Indonesia, dari tahun 2006 hingga tahun 2010 telah terjadi perkembangan dalam pengungkapan tanggung jawab sosial pada laporan tahunan perusahaan. Periode pengamatan yang lebih luas akan menggambarkan secara lebih jelas tentang variabel yang diteliti.

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan dalam penelitian ini adalah ”Apakah kepemilikan pemerintah dan kepemilikan asing berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial dalam laporan tahunan pada perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI)?”

1.2 Perumusan Masalah

Dalam kaitannya dengan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi dasar permasalahan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaruh kepemilikan pemerintah terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial dalam laporan tahunan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2009-2010?
2. Bagaimanakah pengaruh kepemilikan asing terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial dalam laporan tahunan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2009-2010?”
3. Bagaimanakah pengaruh kepemilikan pemerintah dan kepemilikan asing terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial dalam laporan tahunan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2009-2010?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana :

1. Pengaruh kepemilikan saham pemerintah terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial dalam laporan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2009-2010.
2. Pengaruh kepemilikan saham asing terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial dalam laporan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2009-2010.
3. Pengaruh kepemilikan pemerintah dan kepemilikan asing terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial dalam laporan tahunan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2009-2010.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan berguna bagi:

1. Penulis, dengan melakukan penelitian ini maka penulis mendapatkan pengetahuan yang lebih mendalam tentang pengungkapan tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan.
2. Perusahaan, menjadikan perusahaan lebih peduli terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial pada masa mendatang.

3. Pelaku bisnis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk pengambilan kebijakan oleh manajemen perusahaan maupun investor, terutama sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijaksanaan sehubungan dengan penerapan tanggung jawab sosial dalam operasional perusahaan dan pengungkapannya dalam laporan tahunan perusahaan.
4. Pemerintah, untuk mengetahui sampai sejauh mana pengungkapan tanggung jawab sosial yang telah dilakukan perusahaan. Sehingga pemerintah dapat mempertimbangkan suatu standar pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan yang sesuai dengan kondisi Indonesia. Karena sampai dengan saat ini pemerintah belum menetapkan standar yang mengatur tentang bagaimana pelaporan tanggung jawab sosial.
5. Akademis, penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam penelitian-penelitian selanjutnya disamping sebagai sarana untuk menambah wawasan.